

Kolom

Gerakan '2019 Ganti Presiden' Kenapa Diadang?

Sudrajat - detikNews

<https://news.detik.com/kolom/d-4184617/gerakan-2019-ganti-presiden-kenapa-diadang>

Senin 27 Agustus 2018, 16:38 WIB



Sudrajat

Jakarta - Bila menyimak kembali asal-usul gerakan '2019 Ganti Presiden', Mardani Ali Sera dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa hal itu sebagai *counter* atas sikap sejumlah pihak yang ingin agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya hingga 2024. Dalam sebuah acara di televisi pada 3 April lalu, politisi PKS itu sengaja mengenakan gelang berlogo #2019GantiPresiden.

Beberapa hari kemudian tagar serupa mewujud dalam bentuk kaos di pasaran. Lalu, pada 6 Mei 2018 gerakan itu resmi dideklarasikan. Tak cuma dalam bentuk tulisan, gerakan ini secara kreatif juga membuat lagu dengan tema sama. Kalau pun ada kontroversi pada awal Juni lalu, lebih menyoroti bahwa lagu karya Sang Alang itu sebagai jiplakan *Better Man* yang populer dinyanyikan Robbie Williams. Sang Alang telah menepis anggapan tersebut.

Seiring dengan itu, gerakan '2019 Ganti Presiden' terus bergulir, dan dideklarasikan di sejumlah daerah. Sejumlah tokoh yang kerap tampil selain Mardani adalah (mantan) penyanyi dan aktris sinetron Neno Warisman, serta musisi Ahmad Dhani. Deklarasi ini mendapat perhatian luas dari publik ketika melakukan aksi di Solo pada awal Juli lalu. Ketika itu mereka beraksi di ruas jalan persis di depan kedai martabak milik Gibran Rakabuming, putra Jokowi.

Ada yang menyayangkan dan menilai aksi itu kurang elok. Sejak itu, kritik berkembang menjadi aksi penolakan di berbagai daerah. Tak cuma oleh ormas-ormas dan kelompok masyarakat tertentu, tapi juga MUI daerah. Ekspresi penolakan antara lain dilakukan dengan cara-cara yang menjurus ke kekerasan, seperti penghadangan Neno di Batam, lalu kemarin di Pekanbaru. Hal serupa dialami Ahmad Dhani di Surabaya.

Aksi-aksi penghadangan macam itu patut disesalkan. Pun sikap kepolisian yang tidak menerbitkan izin dengan dalih berpotensi memicu konflik horisontal. Di alam demokrasi, gerakan '2019 Ganti Presiden' mestinya disikapi atau diimbangi dengan gerakan serupa. Mereka yang tak setuju bisa mendeklarasikan 'Gerakan Jokowi 2 Periode', misalnya. Bukan dengan cara primitif lewat penghadangan oleh massa.

Apa yang dilakukan Mardani, Neno, dan Dhani sebetulnya juga bukan hal baru dalam perkembangan politik kita. Di periode pertama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Jusuf Kalla, 2004-2009, juga terjadi gerakan seperti yang dilakukan Mardani Cs.

Seiring peringatan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada 2007, misalnya, sejumlah veteran demonstran turun ke jalan. Mereka antara lain Hariman Siregar, Sjahrir, Sri Bintang Pamungkas, Soegeng Sarjadi, hingga budayawan WS Rendra. Mereka mengusung *tagline* dalam gerakannya 'Cabut Mandat SBY-JK' karena dianggap gagal memperbaiki nasib rakyat.

Lantas, apa bedanya Gerakan Cabut Mandat SBY dengan 2019 Ganti Presiden?

Saya ingin membatasi kritik terhadap gerakan ini dari lagu yang mereka rilis sejak awal Juni lalu. Hingga Senin (27/8), video klip *Ganti Presiden* sudah ditonton 1,718,192 kali, mendapat *like* 38 ribu kali, sedangkan yang tak suka 19 ribu. Saya baru tertarik untuk menyimak dengan seksama lagu ini ketika rampai pemberitaan terkait penghadangan terhadap Neno dan Dhani, kemarin.

Ternyata pesan lagu ini didominasi oleh *hoax*. Di pembukaan lagu ini langsung menyatakan, "*Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat susah.*" Menurut saya pencipta lagu ini kurang riset atau mengidap semacam amnesia selektif. Kenapa begitu?

Pada 1981, Iwan Fals merilis lagu *Sarjana Muda* yang memotret fenomena sosial kala itu, ketika para sarjana sulit mendapatkan pekerjaan. "*Engkau sarjana muda, resah tak mendapat kerja*". Jadi, soal pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan itu bukan

isu yang terjadi dalam empat atau lima tahun terakhir ini.

Selanjutnya Sang Alang menulis syair, "*Sepuluh juta lapangan kerja tapi bukan untuk kita.*" Kalimat ini juga jelas *hoax* dan merupakan pelintiran dari kalimat Presiden Jokowi. Dalam sebuah acara, Jokowi pernah mengungkapkan agar jumlah wisatawan asing, khususnya dari China bisa berkunjung ke Indonesia meningkat sampai 10 juta orang. Sejak 2016 isu 10 juta tenaga kerja asing (asal Tiongkok) telah berkali-kali dibantah. Media pun ramai memberitakan bahwa itu tidak ada. Toh Gerakan '2019 Ganti Presiden' sepertinya tak peduli.

Memang ada buruh asing asal Tiongkok bekerja dalam sejumlah proyek. Tapi, jumlahnya sama sekali tak sebesar yang mereka gembarkan. Kehadiran mereka juga tidak permanen. Begitu proyek rampung, ya dikembalikan ke negara asalnya.

Ada juga syair yang cukup menggelikan terkait kenaikan harga BBM yang seolah dilakukan secara diam-diam di malam hari. Padahal sejak era Soeharto, kenaikan harga memang selalu dimulai pukul 00.00. Bedanya, di era Jokowi BBM yang naik adalah yang memang tak disubsidi negara alias mengikuti mekanisme pasar, yakni Pertalite dan Pertamax. Karena mengikuti mekanisme pasar itulah, ketika harga minyak dunia turun, harga di dalam negeri pun akan ikut turun. Dan, itu berkali-kali terjadi.

Syair lainnya yang jauh dari fakta berbunyi, "*Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama.*" Kalau memang Presiden saat ini suka memenjarakan ulama, tentu Mamah Dedeh, Ustaz Maulana, Ustaz Abdul Shomad, Habib Luthfi tak lagi bebas berdakwah di layar kaca maupun di daerah-daerah. Presiden saat ini justru sangat menghargai ulama, buktinya Ketua MUI KH Maruf Amin dipilihnya menjadi calon wakil presiden.

Lantas, siapa gerangan ulama yang dipenjara itu sebenarnya? Sejauh yang saya ingat, ya cuma Alfian Tanjung. Dia dihukum dua tahun karena materi dakwahnya jauh dari nilai-nilai Islam. Dia justru menebar fitnah dan kebencian.

Sejauh yang saya ingat pula, Ketua FPI Rizieq Shihab pernah dibui di rutan Salemba selama tujuh bulan pada 2003. Kala itu dia didakwa melakukan penghasutan mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah.

Lima tahun kemudian, Rizieq kembali diadili. Di era SBY, dia divonis 1,5 tahun pada akhir Oktober 2008. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu menilai Rizieq terbukti bersalah menganjurkan dan membiarkan orang lain melakukan pidana berupa kekerasan.

Sang Alang mestinya berkaca dari Iwan Fals. Menjelang Pemilu 2004, Iwan merilis lagu yang berisi kritik dan harapan terhadap Presiden. Tapi, isinya selain santun dan normatif juga jauh dari unsur *hoax*. Judulnya, *Manusia Setengah Dewa*. Anda sekalian dapat mencari sendiri di *Youtube* bagaimana lirik lagu tersebut. Enak di telinga, lebih meresap di jiwa.

Sudrajat wawancara detikcom. *Tulisan ini pendapat pribadi, tidak mencerminkan kebijakan redaksi*

(mmu/mmu)

Pendukung Gerakan #2019GantiPresiden

Diminta Menahan Diri

Reporter: **Tempo.co**

Editor: **Rina Widiastuti**

Selasa, 28 Agustus 2018 07:47 WIB



Sejumlah relawan membentangkan spanduk saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tertib dan lancar, sehingga terwujudnya 2019 Ganti Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Para pendukung gerakan [#2019GantiPresiden](#) diminta menahan diri supaya tidak menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat. Ketua Setara Institute, Hendaradi, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang pemenuhannya bisa ditunda bila berpotensi menciptakan gangguan keamanan serta pelanggaran hukum.

Baca: [KPU: #2019GantiPresiden Ekspresi Politik, Bukan Kampanye](#)

"Khususnya larangan penyebaran kebencian dan permusuhan ataupun dalam konteks waktu kampanye," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Hendaridi, dalam kondisi tertentu, tindakan aparat keamanan melarang sejumlah acara tersebut bisa dibenarkan. "Jika betul-betul terdapat alasan obyektif yang membenarkannya," ucapnya. Meski begitu, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan larangan atau pembatalan kegiatan tersebut.

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah berujung ricuh pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Di Riau, Ketua Relawan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Kericuhan sempat terjadi saat datang massa yang hendak menjemput Neno. Neno akhirnya kembali ke Jakarta dan acara berlangsung keesokan harinya di Masjid Agung Pekanbaru dengan pengawasan kepolisian.

Baca: [BIN: Acara #2019GantiPresiden Rawan Benturan, Kami Deteksi Dini](#)

Kerusuhan serupa terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa pendukung gerakan ganti presiden bentrok dengan kelompok yang kontra dengan gerakan tersebut. Hotel tempat menginap Ahmad Dhani, musikus yang aktif dalam gerakan ganti presiden, sempat dikepung massa. Sedangkan di Pontianak, Kalimantan Barat, acara #2019GantiPresiden terpaksa dibubarkan kepolisian.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan panitia acara tidak menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan tersebut ke kepolisian. Selain itu, "Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik untuk menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden tertentu. Karena itu, ia pun menyarankan supaya deklarasi gerakan itu dilakukan ketika masa kampanye pemilu dimulai.

Baca: [Istana Bantah Dorong Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden](#)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menilai sikap aparat keamanan sudah berlebihan. Ia memastikan semua kegiatan dengan atribut

#2019GantiPresiden telah memenuhi prosedur, termasuk mengajukan pemberitahuan kepada polisi.

Ia juga mempertanyakan keterlibatan Badan Intelijen Nasional dalam meredam aksi tersebut, terutama saat memulangkan Neno ketika di Pekanbaru. "Bukan langkah yang bijak membawa BIN dalam permasalahan #2019GantiPresiden," kata inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan lembaganya terlibat untuk mencegah terjadinya kerusuhan serta jatuhnya korban. Menurut dia, BIN memiliki peta kerawanan konflik horizontal menjelang pemilihan presiden 2019. "Potensi ini ada karena ada kelompok yang geram," ujarnya. "Ini bukan untuk keberpihakan."

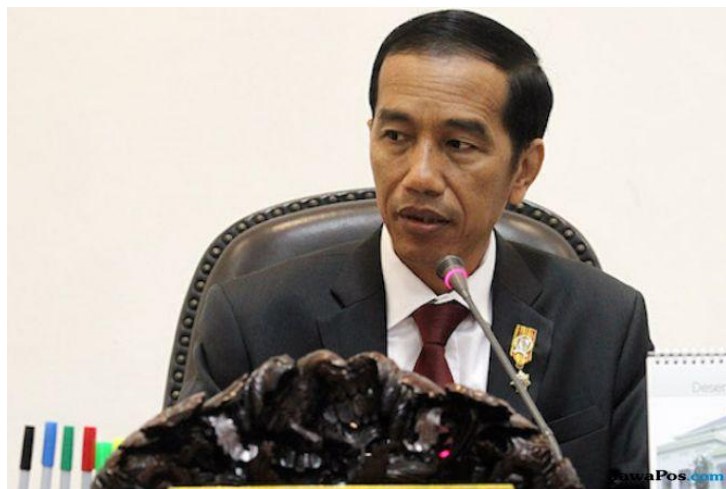
Baca: [KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama dengan #Jokowi2Periode](#)

Selain itu, Wawan menyebutkan, BIN dan kepolisian bertanggung jawab mencegah potensi konflik menyebar ke berbagai daerah, terutama saat masa kampanye pemilihan umum pada 23 September 2018. "Kami meminimalkan upaya terjadinya benturan," tuturnya.

FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA | ARKHELAUS WISNU

Senator DKI Minta Jokowi Angkat Suara

27/08/2018, 11:49 WIB | Editor: Dimas Ryandi



Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera berbicara menyikapi polemik gerakan #2019GantiPresiden yang sudah berujung pada aksi persekusi. (jppn/jawapos.com)

JawaPos.com - Polemik gerakan #2019GantiPresiden yang menuai polemik di sejumlah daerah dan berujung bentrok mendapat sorotan dari banyak kalangan. Salah satunya, dari Ketua Komite III DPD Fahira Idris.

Menurut Fahira, tidak ada putusan pengadilan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden. Karena sampai saat ini belum ada putusan hukum apa pun. "Artinya, gerakan ini legal dan konstitusional," ujar Fahira seperti dalam keterangan tertulis, Senin (27/8).

Ironisnya, kata Fahira, upaya untuk menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah dengan mempersekusi para aktivisnya sudah sampai level yang mengkhawatirkan.

Salah satunya persekusi dan pemulangan yang dialami inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, dan pembubaran massa pro ganti presiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat di negeri ini.

Karena itu, Fahira mendesak agar Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai pemimpin negara harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi. Sekaligus demi menjaga nilai-nilai kebebasan berpendapat yang sudah diatur UUD 45.

"Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespons persoalan ini," pungkas Senator DKI Jakarta itu.

(ce1/aim/JPC)

Aksi "#2019GantiPresiden" dinilai demokrasi kebablasan

Senin, 27 Agustus 2018 00:45 WIB



Arsip Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Ahmad Dhani (kedua kiri) berpose saat akan mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Dhani ditetapkan menjadi tersangka atas laporan pendiri BTP Network Jack Lapian karena kicauannya di sosial media Twitter dan dianggap menghasut serta penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing."

Putussibau, Kalbar (ANTARA News) - Warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menganggap aksi #2019GantiPresiden merupakan demokrasi kebablasan. "Mau ganti presiden pada 2019 tidak harus membuat aksi, karena itu dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata warga Badau, Markus Antonius (36), di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.

Menurut Markus, sebagai warga Indonesia seharusnya menghargai seorang kepala negara, jangan sampai masyarakat diprovokasi untuk kepentingan tertentu.

Dia katakan siapa pun yang menjadi presiden jika sekelompok masyarakatnya seperti saat ini, maka tidak akan ada sisi baiknya seorang pemimpin.

"Kami prihatin atas aksi ganti presiden yang dilakukan sekelompok masyarakat, kenapa harus menyuarakan hal-hal yang membuat negara ini semakin kacau," kata dia.

Sebagai warga perbatasan, Markus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan saling mengisi dalam membangun bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, warga Kecamatan Embaloh Hulu yang juga daerah perbatasan, Adrianus mengatakan aksi #2019GantiPresiden tersebut hanya membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial.

"Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing," ujar Adrianus.

Salah satu pemuda perbatasan, Dominkus (35) menyampaikan masih banyak cara yang jauh lebih terhormat dalam berdemokrasi, jangan melakukan aksi yang dapat

menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Kami sebagai masyarakat kecil menganggap aksi ganti presiden itu merupakan cerminan demokrasi yang sudah kebablasan, hargailah pemimpin bangsa ini," kata dia pula.

**Baca juga: [Separtai, alasan Fadli Zon datang sidang Ahmad Dhani](#)
[Elemen Bela NKRI minta Ahmad Dhani tinggalkan Surabaya](#)**

Pewartu: Teofilusianto Timotius

Editor: Kunto Wibisono